



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

LKjIP juga merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mengimplemetasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip Goodgovernane dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntanbilas pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan bagi pihak pihak yang berkepentingan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pemalang, Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680323 199003 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu adanya akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)

Tahun 2020 Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang menargetkan nilai Investasi sebesar Rp. 744.604.689.677 untuk indikator Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA), Adapun realisasinya adalah sebesar Rp. 3.024.661.126.619 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) untuk tahun 2020 adalah sebesar 406,2 %.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indikator 1 : Nilai SKM

Indikator 2 : Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani.

Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menargetkan Nilai 77 untuk indikator yang pertama yaitu Nilai SKM, Adapun realisasinya adalah sebesar 83,60 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Nilai SKM untuk tahun 2020 adalah sebesar 108,57 %.

Untuk Indikator yang kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani, adapun realisasinya adalah sebesar 100%, Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani untuk tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dinamisnya Regulasi Aplikasi pendaftaran perijinan secara online di Tingkat pusat sehingga Daerah harus segera menyesuaikan.
- 2) Dinamisnya regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga Daerah harus segera menyesuaikan
- 3) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan tepat waktu melalui LKPM Online

- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat UMKM untuk mendaftarkan usahanya
- 5) Masih Adanya Program dan Kegiatan yang belum terakomodir pada Renstra 2016-2021
- 6) Renstra 2016 – 2021 pencapaian indikator pengaduan target kinerjanya menggunakan prosentase, sehingga belum menunjukkan hasil (Outcome).
- 7) Belum adanya pelayanan Perijinan yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
I. Struktur Organisasi	1
II. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
B. ISU STRATEGIS	4
C. KEUANGAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS	6
I. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	6
II. Strategi Dan Arah kebijakan	7
B. PERJANJIAN KINERJA	8
C. RENCANA ANGGARAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN	20
I. Realisasi Anggaran	20
II. Analisis Efisiensi Sumber Daya	21
C. INOVASI	24
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	29

(PK Perubahan Th 2020, IKU, LHE Inspektorat atas AKIP Th 2020, Daftar Prestasi dan Dokumentasi Inovasi)

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	7
Tabel II.2	Sasaran dan Program	7
Tabel II.3	Strategi dan Arah Kebijakan	8
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
Tabel II.5	Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
Tabel II.6	Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2020	12
Tabel II.7	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis	13
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel III.2	Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Tahun 2020	16
Tabel III.3	Pengukuran Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi”	17
Tabel III.4	Pengukuran Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”	18
Tabel III.5	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020	18
Tabel III.6	Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	20
Tabel III.7	Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian sasaran Strategis	21
Tabel III.8	Realisasi Anggaran Tahun 2020	22
Tabel III.9	Realisasi Retribusi Tahun 2020	24
Tabel IV.1	Capaian kinerja 2020	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

- i. Struktur Organisasi
- ii. Tugas Pokok & Fungsi

B. Isu Strategis

C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pemalang nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

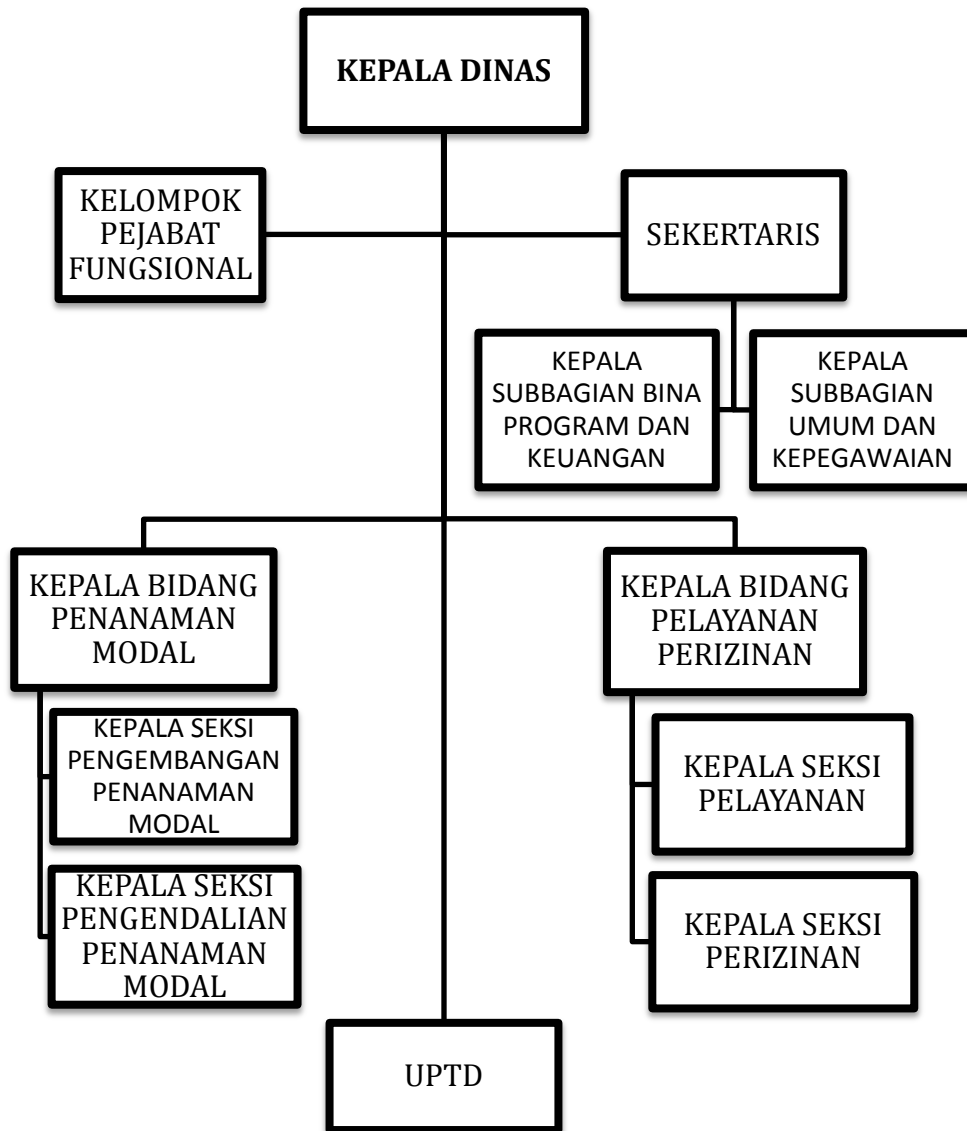
A. GAMBARAN UMUM

I. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Perizinan;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gb.I.1 BAGAN STRUKTUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**



II. Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Pasal 3 huruf d point 7 dan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Bab III Pasal 4 adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal, yang meliputi :

- a. Sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :
 - 1) Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- 2) Pembuatan peta potensi investasi;
- b. Sub urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. Sub urusan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

B. ISU STRATEGIS

Sesuai tugas dan fungsi, keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pemalang mempunyai arti yang penting bagi terwujudnya iklim investasi yang baik dan pelayanan perijinan dan non perijinan . utamanya dalam memberikan kemudahan-kemudahan dan penyederhanaan peraturan dalam berusaha. Hal ini diharapkan dapat mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pemalang. Sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia (PNS) yang belum memadai.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan terpadu satu pintu
- c. Regulasi Aplikasi pelayanan perijinan, system pelaporan Investasi secara online yang berkembang pesat di tingkat pusat, sehingga Daerah secara intensif, optimal dan secara terus menerus harus menyesuaikan.
- d. Dinamisnya Regulasi peraturan Perundang-undangan sehingga regulasi yang mengatur perizinan harus disesuaikan dengan perkembangan atau pandangan yang baru agar bisa berjalan efektif.
- e. Belum optimalnya kajian potensi unggulan investasi di daerah
- f. Belum optimalnya promosi investasi di daerah
- g. Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik
- h. Adanya dampak covid 19, terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Pemalang, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pemalang tetap melaksanakan pelayanan perijinan dengan menerapkan standart protokol kesehatan.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten.

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan Tahun 2020 sebesar

7.446.931.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 3.390.657.000 dan belanja tidak langsung 4.026.274.000. Dengan adanya dampak covid 19, diperlukan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran dan percepatan penanganan covid 19 maka terjadi rasionalisasi Anggaran APBD Kabupaten Pemalang 2020. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, pada APBD Perubahan Tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 5.487.176.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.520.475.000 (turun 25,66%) dan belanja tidak langsung sebesar 2.966.701.000 (turun 26,66%), yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, mendapat alokasi Belanja langsung sebesar 2.520.475.000.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 2.520.475.000,- Di jabarkan ke dalam 9 program dan 39 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 12 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 862.630.656.**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari 12 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 376.934.500.**

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 26.100.000.**

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 192.137.500.**

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.856.000**

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penggaaran SKPD

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 37.383.344**

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terdiri dari 7 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 440.185.000**

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 560.263.000**

9. Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 19.985.000**

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

C. Rencana Anggaran Tahun 2020

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

I. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke- 2 **“Pemalang Berdaulat”**, yaitu sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daeah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. II.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	1. Meningkatnya nilai realisasi investasi	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	2. Nilai SKM 3. Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani

Selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan di sasaran harus terukur dalam indikator Dan kemudian dijabarkan Strategi kebijakan-kebijakan tersebut kedalam program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. II.2
Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2. Program penanganan pengaduan di Bidang investasi dan Perijinan 3. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi

II. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel. II.3
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			
1. Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	1. Meningkatnya nilai realisasi investasi	a. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP, dan peningkatan jaringan dengan investor b. Peningkatan Kemudahan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja apatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan / kemajuan penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penerapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran (DPA dan DPPA) Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020. dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel. II.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	744.604.689.677	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah Pengembangan potensi unggulan daerah
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	a. Nilai SKM b. Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditanganin	77 100%	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Kajian Kebijakan Penanaman Modal Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan

Tabel. II.5
Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	744.604.689.677	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
				Penyediaan jasa surat menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Meningkatnya	a. Nilai SKM	77	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	kepuasan	b. Presentase pengaduan pelayanan	100%	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	masyarakat	perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditanganin		Penyediaan alat tulis kantor
	terhadap pelayanan public			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan makanan dan minuman
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
				Penyediaan Jasa Keamanan
				Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
				Pengadaan peralatan gedung kantor
				Pengadaan Mebeleur
				Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
				Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapanya
				Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembantas lingkungan kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala Softwere dan Sistem Informasi
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan
				Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
				Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
				Program Peningkatan perencanaan dan pelaporan
				Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dari APBD Kabupaten Tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan alokasi APBD penetapan Tahun 2020 sebesar 7.446.931.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 3.390.657.000 dan belanja tidak langsung 4.026.274.000. Dengan adanya dampak covid 19, diperlukan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran dan percepatan penanganan covid 19, maka terjadi rasionalisasi Anggaran APBD Kabupaten Pematang Jaya 2020. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pemalang, pada APBD Perubahan Tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 5.487.176.000 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.520.475.000 (turun 25,66%) dan belanja tidak langsung sebesar 2.966.701.000 (turun 26,66),

Belanja langsung sebesar 2.520.475.000 dijabarkan ke dalam 9 program dan 39 kegiatan. Dan yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis ada 3 program dan 8 kegiatan. Sebagai pendukung sasaran strategis ada 6 Program, 31 kegiatan

Adapun target belanja tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6
Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2020

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	862.630.656
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	376.934.500
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.100.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	192.137.500
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.856.000
6	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	37.383.344
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	440.185.000
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	560.263.000
9	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	19.985.000
Total Anggaran		2.520.475.000

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel. II.7
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1.940.227.000	76,98%	Didukung oleh 7 (Tujuh) program: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan perencanaan dan pelaporan 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	580.248.000	23,02%	Didukung oleh 2 (Dua) program: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Anggaran
- C. Inovasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 – 90 %	Tinggi	
3.	66 – 75 %	Sedang	
4.	51 – 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. III.2
Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD (2021)	KINERJA s/d 2020 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	744.604.689.677	3.024.661.126.619	406,2	749.604.689.677	406,2
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	77	83,60	108,57	77,2	108,57
		Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pemalang

Sasaran 1

Meningkatnya nilai realisasi investasi

Sasaran 1 Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Pemalang. Meningkatnya nilai realisasi tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi didukung oleh kegiatan – kegiatan dengan beberapa indikator yaitu :

1. Jumlah Kebutuhan Potensi unggulan di daerah yang dikembangkan
2. Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
3. Jumlah kebutuhan kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah yang terfasilitasi
4. Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana
5. Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara

Tabel. III.3
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
“Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi”

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
	2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	859.982.	833.101.	2.586.454.	744.604.	3.024.661.	406,2	749.604.	406,2
	152.331	011.981	218.618	689.677	126.619		689.677	

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pemalang

Capaian realisasi investasi tahun 2020 sebesar 406,2 dikarenakan adanya program klinik LKPM. Adanya Klinik LKPM pengusaha harus melaporkan usahanya lewat klinik LKPM, sehingga pengusaha yang melaporkan maka nilai investasinya dapat terdata.

Sasaran 2

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran 2 Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2026 – 2021 adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Pemalang. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dicapai dengan melaksanakan Program peningkatan iklim dan realisasi investasi serta Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan . Program peningkatan iklim dan realisasi investasi didukung oleh kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dengan indikator jumlah permohonan perijinan yang diterbitkan. Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan dengan indikator Jumlah penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan yang terselesaikan.

Tabel. III.4

Pengukuran Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik"

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2019	Tahun 2020			RPJMD	
	2017	2018		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
Nilai SKM	76,06	82,97	79,76	77	83,60	108,57	77,2	108,57
Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pemalang

Tabel. 3.3 menyebutkan nilai SKM tahun 2019 yaitu 79,76 di tahun 2020 naik yaitu 83,6, hal ini membuktikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu benar-benar berupaya untuk selalu meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, agar masyarakat yang membuat izin betul-betul merasa terlayani dengan baik.

Rincian Indeks Nilai Perunsur Layanan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. III.5

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3,29	Sesuai	0,36
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,26	Mudah	0,36
3	Waktu Penyelesaian	3,21	Cepat	0,36
4	Biaya/Tarif	3,73	Gratis	0,41
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,30	Sesuai	0,37
6	Kompetensi Pelaksana	3,28	Kompeten	0,36
7	Perilaku Pelaksana	3,27	Sopan dan Ramah	0,36
8	Sarana dan Prasarana	3,30	Baik	0,37
9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,50	Berfungsi Kurang Maksimal	0,39
Jumlah NRR IKM Tertimbang				3,34
Indeks Kepuasan Masyarakat				83,60
Mutu Pelayanan				B
Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Pemalang				Baik

Sumber : Analisis Data Primer

Keterangan :

25,00 – 64,99 : Tidak Baik

65,00 – 76,60 : Kurang Baik

76,61 – 88,30 : Baik

88,31 – 100,00 : Sangat Baik

Prosentase Pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani 100 % tertangani.

Permasalahan

1. Dinamisnya regulasi aplikasi pelayanan perizinan secara onlen yang berkembang pesat, sehingga Daerah harus cepat menyesuaikan.
2. Dinamisnya regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga Daerah harus segera menyesuaikan
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan tepat waktu melalui LKPM Online
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat UMKM untuk mendaftarkan usahanya
5. Masih Adanya Program dan Kegiatan yang belum terakomodir pada Renstra 2016-2021
6. Renstra 2016 – 2021 pencapaian indikator pengaduan target kinerjanya menggunakan prosentase, sehingga belum menunjukkan hasil (Ootcame).
7. Belum adanya pelayanan Perijinan yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik

Solusi

1. Melakukan perbaikan – perbaikan Aplikasi secara optimal
2. Melakukan peningkatan SDM melalui kegiatan pelatihan secara terus menerus.
3. Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui Neon Box, Billboard, Leaflet, Media Cetak dan Elektronik (Radio, Website)
4. Melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal serta sosialisasi LKPM Online kepada para pengusaha.
6. Memasukan program dan kegiatan baru pada renstra baru tahun 2021-2026
7. Memperbaiki Renstra 2016-2021 di Indikator Kinerja pengaduan pada renstra baru tahun 2021-2026

Program Pendukung

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) perhitungannya datanya diperoleh dari jumlahnya investasi yang masuk melalui permohonan izin yang masuk ke DPMPTSP. Dibandingkan tahun sebelumnya Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pemalang meningkat dikarenakan :

- a. Pelayanan Perijinan secara Online
- b. Adanya pendampingan melalui Klinik LKPM Online
- c. Promosi Investasi (Gerai Investasi, Pameran, Website Dinas PMPTSP)

2. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) perhitungannya datanya diperoleh dari jumlahnya investor yang masuk melalui permohonan izin yang masuk ke DPMPTSP. Dibandingkan tahun sebelumnya Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Pemalang meningkat dikarenakan :

- a. Pelayanan Perijinan secara Online
- b. Adanya pendampingan melalui Klinik LKPM Online
- c. Promosi Investasi (Gerai Investasi, Pameran, Website Dinas PMPTSP)

3. Indikator Prosentase Pengaduan Pelayanan Perijinan dan Investasi yang ditindaklanjuti/ditangani

Prosentase Pengaduan Pelayanan Perijinan dan Investasi yang ditindaklanjuti/ditangani perhitungannya diperoleh dari jumlahnya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPMPTSP. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah Pengaduan masyarakat turun (pada tahun 2019 sejumlah 10 Pengaduan dan pada tahun 2020 sejumlah 5 pengaduan).

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

I. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel III.5
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1.940.227.000	1.911.414.535	98,51
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	580.248.000	570.216.124	98,27

Jumlah	2.520.475.000	2.481.630.659	98,46
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pematang

Berdasarkan tabel di atas, untuk keseluruhan penyerapan anggaran mencapai 98,46%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas PMPTSP telah melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut .dengan maksimal.

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. III.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	406,2	1.911.414.535	98,51	307,69
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Nilai SKM	108,57	570.216.124	98,27	6,01
		2. Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	100			

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Jumlah Nilai investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA).

Tabel. III.7
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	862.630.656,00	858.002.601,00	99,46
Penyediaan jasa surat menyurat	112.915.000,00	111.892.000,00	99,09
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.725.056,00	102.880.345,00	98,24
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	35.300.000,00	33.932.500,00	96,13
Penyediaan jasa kebersihan kantor	73.324.000,00	73.319.000,00	99,99
Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	49.900.500,00	99,80
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.016.600,00	39.991.000,00	99,94
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.800.000,00	11.747.500,00	99,56
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.600.000,00	11.591.000,00	99,92
Penyediaan makanan dan minuman	101.850.000,00	101.802.500,00	99,95
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	148.890.000,00	148.750.000,00	99,91
Penyediaan jasa keamanan	127.000.000,00	127.000.000,00	100,00
Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	45.210.000,00	45.196.000,00	99,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	376.934.500,00	374.831.102,00	99,44
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.400.000,00	5.992.000,00	93,63
Pengadaan peralatan gedung kantor	41.050.000,00	40.500.000,00	98,66
Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00
Pengadaan komputer dan perlengkapannya	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.029.500,00	70.023.000,00	99,99
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	141.570.000,00	141.432.406,00	99,90
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.440.000,00	27.440.000,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala	5.805.000,00	5.805.000,00	100,00

peralatan gedung kantor			
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	11.750.000,00	11.741.000,00	99,92
Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	5.520.000,00	5.472.000,00	99,13
Pemeliharaan rutin/ berkala software dan sistem informasi	67.370.000,00	66.425.696,00	98,60
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.100.000,00	26.100.000,00	100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26.100.000,00	26.1.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	192.137.500,00	189.893.317,00	98,83
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	71.133.500,00	120.598.817,00	99,67
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	121.004.000,00	62.294.500,00	97,41
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.856.000,00	4.856.000,00	100,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.856.000,00	4.856.000,00	100,00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	37.383.344,00	35.568.105,00	95,14
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	37.383.344,00	35.568.105,00	95,14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	440.185.000,00	422.163.410,00	95,91
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	0,00	0,00	0,00
Pengembangan potensi unggulan daerah	123.970.000,00	122.308.800,00	98,66
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	87.906.500,00	79.685.126,00	90,65
Pengawasan dan evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	49.706.000,00	44.174.018,00	88,87
Penyelenggaraan pameran	154.902.500,00	153.056.472,00	98,81

investasi			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.700.000,00	22.938.994,00	96,79
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	560.263.000,00	554.426.554,00	98,96
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	498.513.000,00	497.173.274,00	99,73
Kajian kebijakan penanaman modal	61.750.000,00	57.253.280,00	92,72
Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan	19.985.000,00	15.789.570,00	79,01
Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	19.985.000,00	15.789.570,00	79,01
Jumlah Anggaran	2.520.475.000,00	2.481.630.659,00	98,46

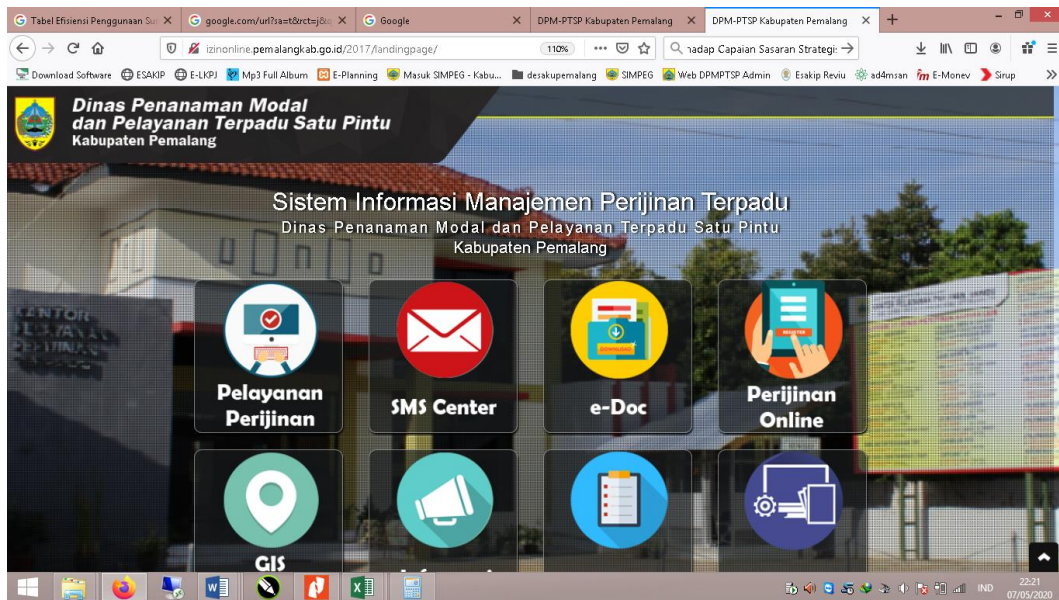
Tabel. III.8
Realisasi Retribusi Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Target Retribusi	Realisasi	%
4.1.2.03.01	RetribusiIzin Mendirikan Bangunan	2.220.000.000	2.130.681.500	95,98

C. INOVASI

1. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perijinan Terpadu) "izinonline.pemalangkab.go.id", Terdiri dari 8 portal yaitu
 1. Pelayanan perijinan ==> menu ini khusus petugas dpmptsp untuk mengolah data permohonan perijinan dari pemohon
 2. SMS Center ==>
 3. E-Doc → Aplikasi ini untuk menyimpan data atau dokumen secara online
 4. Perijinan Online → Aplikasi untuk pelayanan perijinan secara online, dari mulai syarat, formulir izin, cek status permohonan. Ketika SK sudah jadi pemohon tinggal datang satu kali ke kantor untuk mengambil SK izin.
 5. GIS (Geografis information system) Sistem Informasi perijinan berbasis GIS → untuk melihat lokasi daftar pemohon yang sudah mempunyai izin dalam bentuk peta digital
 6. Informasi → mengetahui jenis izin beserta syaratnya
 7. IKM → Aplikasi untuk mengisi keterkaitan kepuasan atau tidak puas atas pelayanan yang di berikan oleh dinas pmtsp,

8. OSS (Online Single Submission) → pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss.go.id)



Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perijinan Terpadu)

2. Gerai Ivestasi (investasi.pemalangkab.go.id)

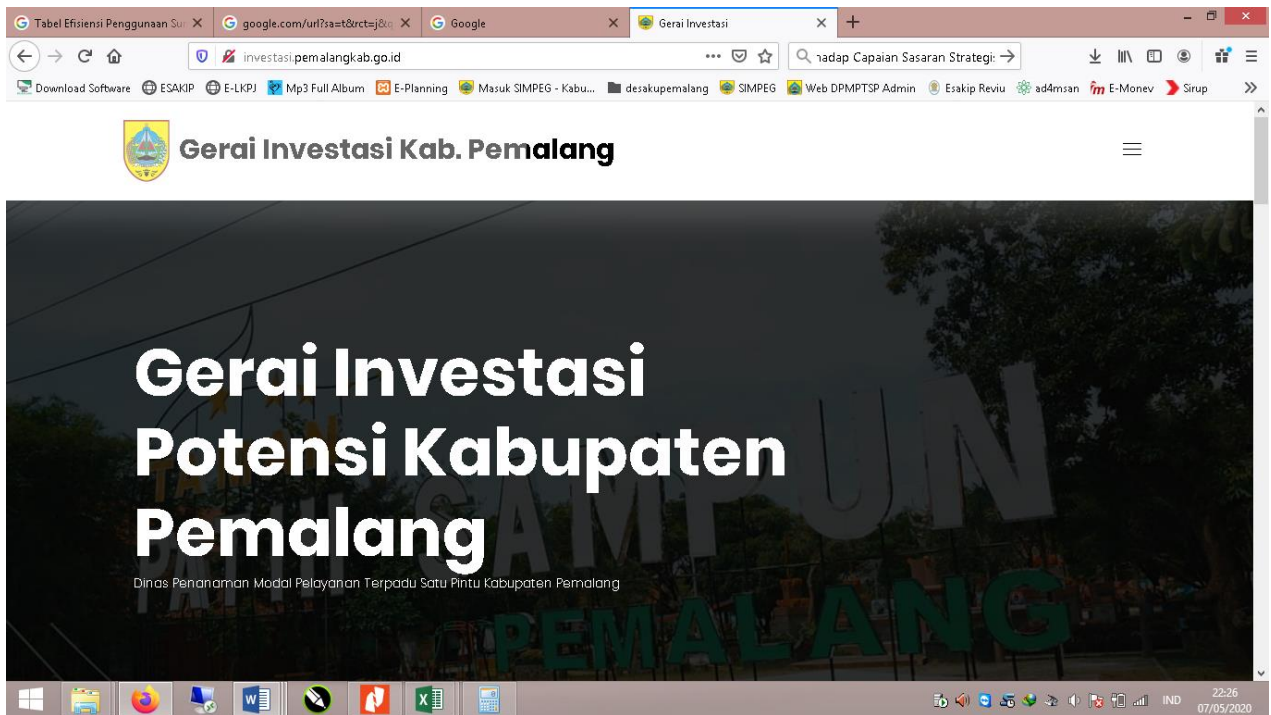
Adalah sebuah web site yang berisi Sektor sektor potensi investasi beserta komoditas unggulan kab pemalang. Pada tahun 2020 ini Gerai Investasi ikut menjadi pemenang dalam lomba Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Mendapat peringkat No 9.

1. Sektor potensi investasi

- a. Sektor Hortikultura (Budidaya durian, sayuran, teh, kopi, mangga arumanis)
- b. Industri (kamir, sarung goyor, olahan nanan, batik tulis)
- c. Sektor perikanan (udang vaname, bandeng dan kepiting soka)
- d. Sektor pertanian (budidaya padi sehat dengan SRI System of rice intensification)
- e. Sektor peternakan
- f. Sektor pariwisata (curug sipedil, widuri water park)

2. Komoditas unggulan

- a. Nanas madu di moga, pulosari, belik, watukumpul, dan randudngkal
- b. Sarung goyor di wanarejan utara, luas ahan 100 m2, nilai inves 500jt
- c. Mangga arumanis, nilai investasi 160jt/Ha dengan rencana luas 100 Ha



Website Gerai Ivestasi(<http://investasi.pemalangkab.go.id>)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPMPSTP Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dikategorikan Sangat Baik, yang terinci dari 2 sasaran strategis yang mencakup 3 indikator sasaran yaitu **Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Nilai SKM dan Prosentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ ditangani**, rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 184,88 % atau bermakna Sangat Baik. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. IV.1
Capaian Kinerja 2020**

		Misi, Tujuan dan Sasaran	Capaian Kinerja 2020
1.		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	
1.1		Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	
	1.1.1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	406,2%
1.2		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	
	1.2.1	Nilai SKM	108,57%
	1.2.2	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	100%
Prosentase Rata-rata capaian Tahun 2020			204,92%

- b. Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya, 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat

mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (kategori capaian **Sangat Baik**).

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui Neon Box, Billboard, Leaflet, Media Cetak dan Elektronik (Radio, Website)
2. Melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal serta sosialisasi LKPM Online kepada para pengusaha.
4. Memasukan program dan kegiatan baru pada renstra baru tahun 2021-2026
5. Renstra 2016 – 2021 pencapaian indikator pengaduan target kinerjanya menggunakan prosentase, sehingga belum menunjukkan hasil (Ootcome). Maka akan diperbaiki pada Renstra 2021-2026.

C. SARAN / MASUKAN

Beberapa saran atau masukan yang menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang penanaman modal dan perijinan dan non perijinan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi, promosi, dan kerja sama investasi atau meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi serta tindak lanjut pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
3. Pengembangan kapasitas baik secara formal maupun informal secara continue , untuk meningkatkan kualitas SDM;
4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan pemutakhiran terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu
5. Memperbaiki Renstra 2016-2021 di Indikator Kinerja pengaduan pada renstra baru tahun 2021-2026

Demikian laporan kerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 , Semoga dapat menjadi pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.